

**FOCUS GROUP DISCUSSION  
DISAMPAIKAN KEPADA KOMISI VII DPR RI**

# **RENCANA PENGEMBANGAN PROYEK COAL TO DME**

APRIL 2022

**pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan**  
*Centre For Energy and Mining Law Studies*

# Project Profile : Coal to DME Tanjung Enim

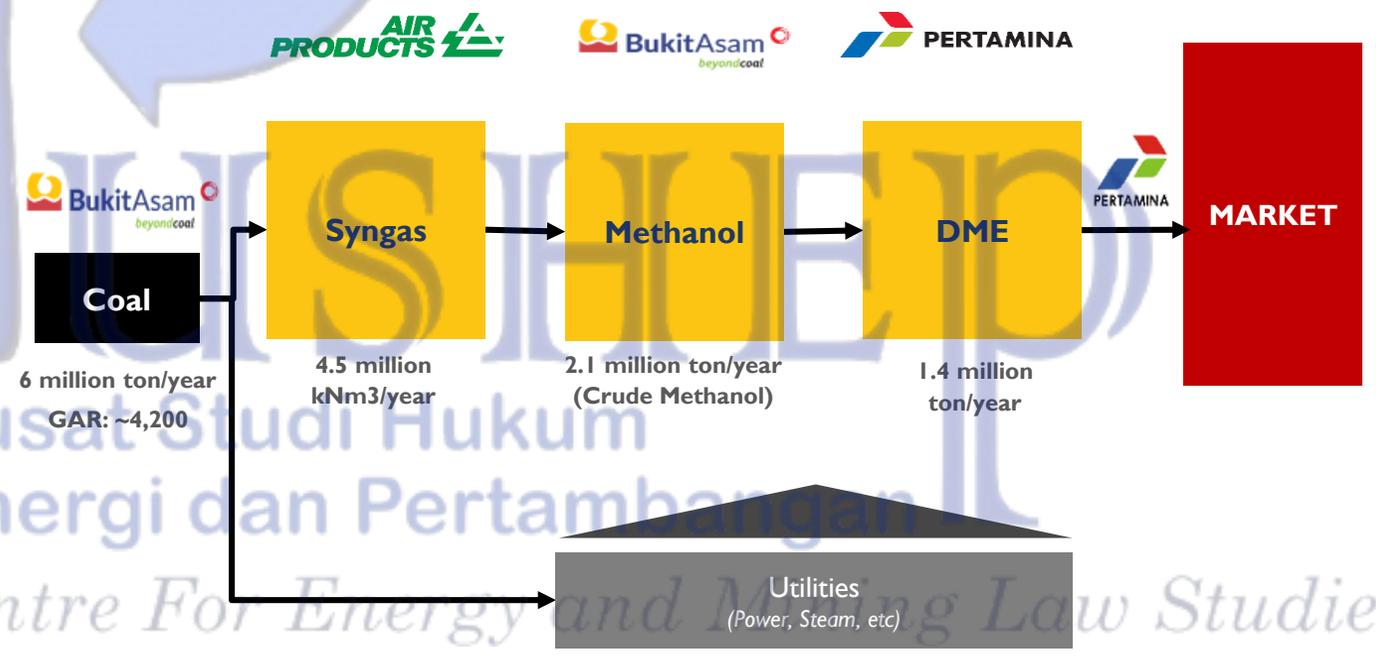
## Overview Project

- Total Investment**  
~ **US\$ 2.3 Billion**
- Employment**  
~ **1.000 workers**  
(during plant operational)
- Land Area**  
± 164 Ha
- Location**  
Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan

## Objective

Pengembangan Batubara menjadi Dimetil Eter (DME) yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energy nasional melalui substitusi impor LPG

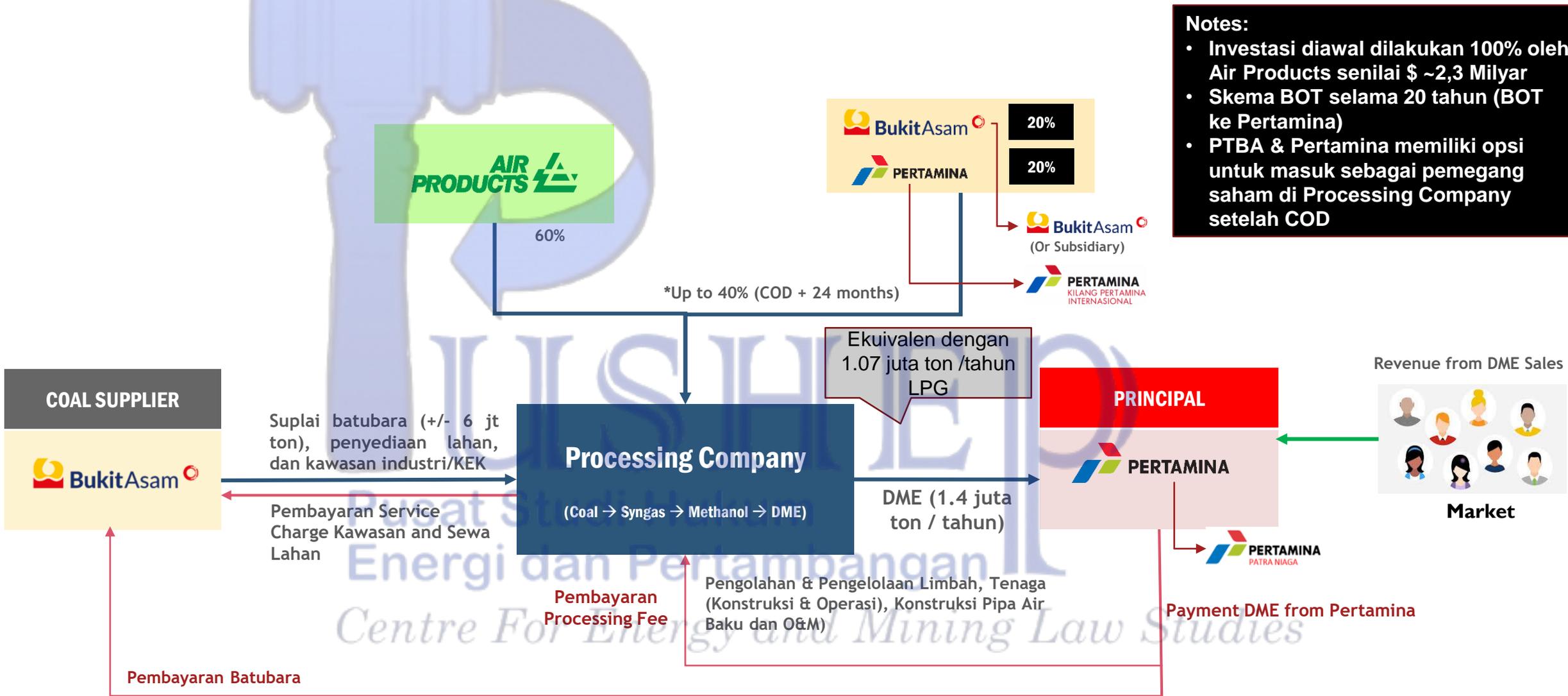
## Coal-to-DME Production Chain



**Total Capex: \$ 2.3 Bn**

# Skema Bisnis Proyek Coal to DME

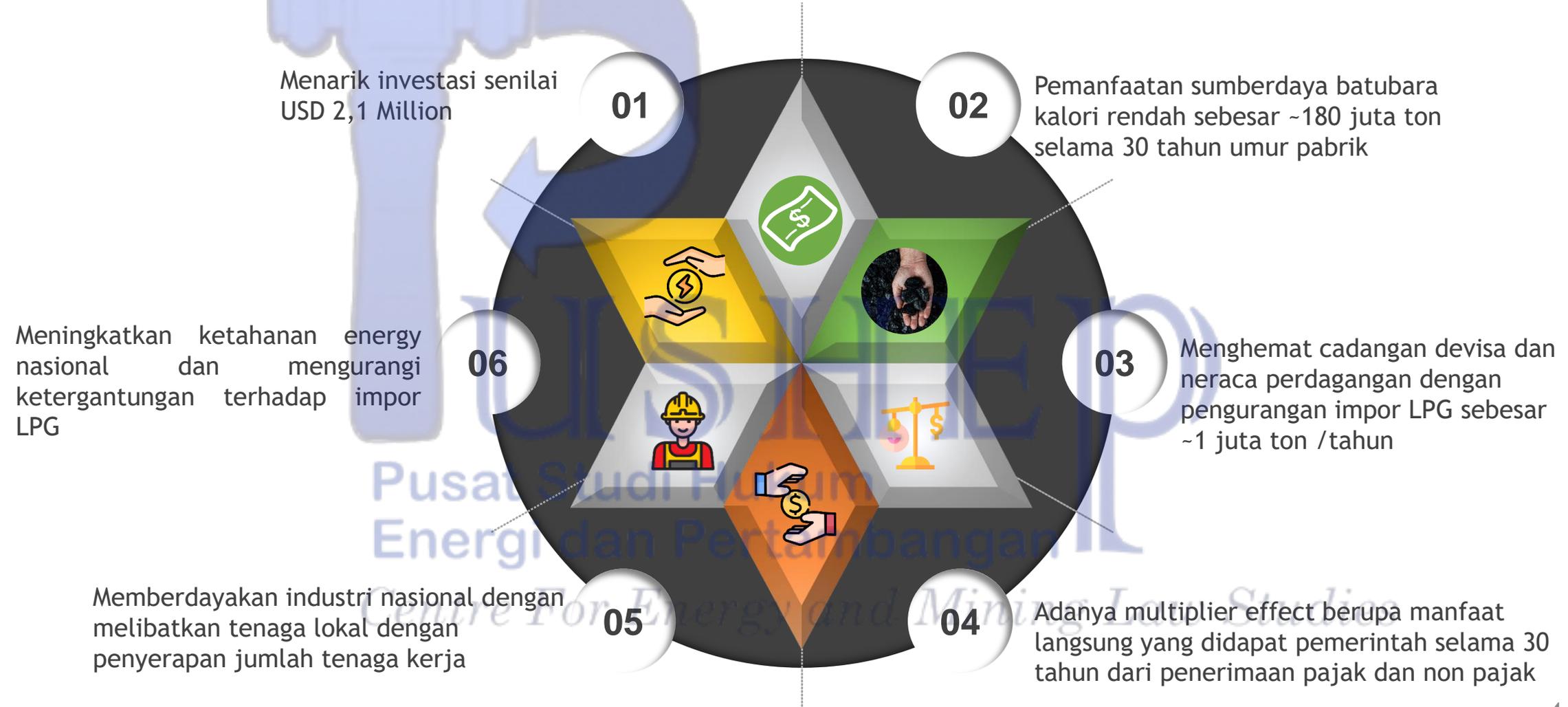
berdasarkan draft Processing Services Agreement Maret 2022



- Notes:**
- Investasi diawal dilakukan 100% oleh Air Products senilai \$ ~2,3 Milyar
  - Skema BOT selama 20 tahun (BOT ke Pertamina)
  - PTBA & Pertamina memiliki opsi untuk masuk sebagai pemegang saham di Processing Company setelah COD

Centre For Energy and Pertambangan Energi dan Pertambangan  
 Centre For Energy and Mining Law Studies

# Nilai Tambah dari Proyek Coal to DME dan Kawasan Industri Tanjung Enim - BACBIE



# Update Progres Coal to DME

Item	Penjelasan	Update Progres	Tindak Lanjut
<b>Verifikasi harga batubara dengan BPKP</b>	<p>Telah dilakukan konsinyering untuk verifikasi harga batubara untuk proyek Coal to DME antara tim BPKP dengan tim PTBA pada tanggal 21-22 Januari 2022</p>	<p>Penyelesaian laporan hasil verifikasi harga batubara oleh BPKP</p>	<p>Berkoordinasi dengan BPKP untuk mendapat laporan hasil verifikasi harga</p>
<b>Perpres dan Peraturan Turunan</b>	<p>Koordinasi dgn Kemenko Marvest, ESDM dan K/L terkait Penugasan dlm bentuk Perpres dan Peraturan Turunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• khususnya terkait keikutsertaan PTBA dalam proyek Coal to DME</li> <li>• Mengalokasikan cadangan dan memasok batubara untuk proyek gasifikasi</li> <li>• Regulasi mengenai formula harga dan prasyarat pasokan batubara untuk proyek Coal to DME</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Biro Hukum Dirjen Minerba, Biro Hukum KBUMN dan tim penyusunan Perpres BKPM, untuk menyampaikan concern PTBA secara informal</li> <li>• PTBA telah menyampaikan concern secara resmi melalui surat ke K/L terkait (KBUMN, BKPM, KESDM, MIND ID) secara tertulis pada 11 Februari 2022</li> <li>• Hasil audiensi dengan OJK 7 Maret 2022, OJK menyampaikan apabila substansi Perpres/peraturan turunannya belum mengakomodir mengenai nilai transaksi maka transaksi harus dilakukan dengan skema B to B dan menerapkan harga wajar. Jika tidak maka harus diputuskan pada RUPS Independen</li> </ul>	<p>Koordinasi dan pengawalan untuk memastikan substansi Perpres sesuai dengan business requirement</p>
<b>CCS</b>	<p>Hasil rapat yang dipimpin oleh Kementerian ESDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CCS (Carbon Capture Storage), dijajaki dengan Chiyoda, Jepang</li> <li>- Menggunakan skema JCM (Join Credit Mechanism)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTBA-Chiyoda telah menandatangani NDA per 9 Mar 2022</li> </ul>	<p>Persiapan penyiapan data untuk studi oleh Chiyoda</p>
<b>Pelaporan Kepada Stakeholders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTBA secara aktif berkoordinasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Mind Id) untuk melaporkan progress Coal to DME serta memohon arahan tindaklanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTBA telah melaporkan progress Coal to DME kepada Dewan Komisaris dan meminta arahan melalui surat pada 2 Maret 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ PTBA berkomitmen penuh untuk senantiasa mendukung proyek pemerintah</li> <li>➢ Melaporkan progress penyelesaian pending isu</li> <li>➢ Memohon arahan dan/atau persetujuan untuk penandatanganan PSA</li> </ul> </li> <li>• Surat balasan dari MIND ID pada tanggal 25 Maret 2022</li> <li>• Surat balasan dari Dewan Komisaris tanggal 28 Maret 2022</li> </ul>	

# Dukungan yang Diperlukan

ITEM	KONDISI SAAT INI	UPAYA YANG DIPERLUKAN
Harga Batubara	Harga batubara 15,86 US\$/ton akan membebani PTBA selama kontrak berjalan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketentuan atas harga batubara untuk proyek Coal to DME perlu mempertimbangkan perhitungan ongkos biaya produksi serta margin yang wajar bagi perusahaan batubara sebagaimana ketentuan harga batubara mulut tambang untuk proyek PLTU</li><li>• Patokan harga DME yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu dihitung dengan mempertimbangkan seluruh komponen-komponen biaya produksi DME secara wajar</li></ul>
Alokasi Tambang dan Spesifikasi Batubara	APCI menetapkan spesifikasi batubara yang tidak sesuai dengan alokasi tambang yang digunakan untuk proyek Coal to DME	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan IUP Tambang Banko Tengah A sebagai alokasi sumber batubara untuk proyek Coal to DME serta penentuan spesifikasi batubara didasarkan pada hasil pengujian bersama yang representatif atas tambang yang dialokasikan</li></ul>
Lahan	APCI tidak mengalokasikan biaya yang cukup untuk sewa lahan, penyiapan lahan, dan service charge kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• APCI perlu melakukan mengalokasikan biaya sewa lahan, penyiapan lahan, dan service charge kawasan industri yang wajar untuk seluruh fasilitas yang diperlukan</li><li>• Patokan harga DME yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu dihitung dengan mempertimbangkan seluruh komponen-komponen biaya produksi DME secara wajar</li></ul>

# Dukungan Regulasi Untuk Implementasi DME dari aspek **Hulu**

No	Instansi	Dukungan yang Dibutuhkan	Peraturan Terkait	Catatan
1	Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan PTBA memasok batubara untuk proyek coal to DME pada wilayah KEK</li> <li>• Dukungan dari kementerian terkait yang dituangkan dalam peraturan turunan termasuk kemungkinan pemberian kompensasi/ Tambah PMDN kepada PTBA/Pertamina dalam hal penugasan tidak fisibel</li> </ul>	UU Cipta Kerja 2020 (Omnibus Law, Pasal 66 UU BUMN)	Peraturan Presiden merupakan Condition Precedent for Effectiveness Agreement.
2	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan biaya produksi batubara PTBA dan syarat pemberlakuannya (adjustment)</li> <li>• Royalti 0% untuk batubara gasifikasi</li> <li>• Penetapan wilayah tambang IUP Banko Tengah A sebagai sumber cadangan</li> <li>• Jaminan IUP seumur tambang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 3/2020 (Pasal 47)</li> <li>• Peraturan Presiden penugasan</li> <li>• Permen ESDM 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara</li> </ul>	Merupakan Condition Precedent for Effectiveness Agreement.
3	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelakuan kebijakan perpajakan khusus untuk pasokan batubara pada proyek Coal to DME</li> <li>• Pemberian kompensasi dalam hal penugasan tidak fisibel termasuk opsi PMDN (berkoordinasi dengan Kemen BUMN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Cipta Kerja 2020 (Omnibus Law, Pasal 66 UU BUMN)</li> <li>• Peraturan Presiden penugasan</li> </ul>	Merupakan Condition Precedent for Effectiveness Agreement.
4	Kementerian Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaminan Change in Law/ Political FM</li> <li>• Kemudahan dalam perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Penugasan</li> <li>• PP 40/2021</li> </ul>	Merupakan Condition Precedent for Effectiveness Agreement.
5	Kementerian BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan sebagai fasilitator sinergi BUMN</li> <li>• Pemberian kompensasi dalam hal penugasan tidak fisibel termasuk opsi PMDN (berkoordinasi dengan Kemenkeu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Cipta Kerja 2020 (Omnibus Law, Pasal 66 UU BUMN)</li> <li>• Peraturan Presiden penugasan</li> </ul>	Akan diatur dalam Kepmen
6	Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan percepatan penetapan atas permohonan KEK untuk wilayah proyek</li> <li>• Kemudahan perizinan</li> </ul>	PP 40/2021	Akan diatur dalam PP
7	Kementerian ATR/BPN	Dukungan terkait akuisisi dan sertifikasi lahan (misalnya lahan proyek, pipa air, pipa DME)	UU 2/2012, PP 19/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam proses pengajuan sertifikasi ke Pemerintah</li> <li>• Bagian dari <i>Conditional Precedence</i></li> </ul>
8	Kementerian PUPR	Dukungan terkait izin trase (ROW) untuk pembangunan pipa air	UU 17/2019 (Pasal 44-53), PP 42/2008 (Pasal 95-105)	Bagian dari <i>Conditional Precedence</i>

# Timeline Coal to DME

(berdasarkan progres saat ini dan periode waktu yang tercantum draft PSA dari APCI 16 Februari)



Note: timeline masih dalam pembahasan dengan Pertamina dan APCI



**TERIMA KASIH**

Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan  
*Centre For Energy and Mining Law Studies*